



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ 2024



*Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila
Kab. Bone Bolango - Prov. Gorontalo
Kode Pos : 96583*

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO. TA. 2024**

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai OPD

Tujuan yang akan dicapai pada urusan wajib bukan pelayanan dasar (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yaitu meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

b. Sasaran dan Program

Data Capaian Indikator Kinerja pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024**

NO	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase Capaian Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
I	Sasaran :	Indikator Kinerja :			
	<i>Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)</i>	<i>Jumlah Koperasi Berkualitas</i>	<i>20 Kop Sehat</i>	<i>20 Kop Sehat</i>	<i>100</i>
		<i>Jumlah UKM yang berdaya saing</i>	<i>70 UKM</i>	<i>50 UKM</i>	<i>71,43</i>
	<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan</i>	<i>Nilai SAKIP (2024)</i>	<i>74,68</i>	<i>79,46</i>	<i>106,40</i>
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	20 Koperasi	100
	Program Pendidikan Dan Latihan	Jumlah SDM Koperasi yang	390 orang	475 orang	121

NO	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase Capaian Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
	Perkoperasian	meningkat kapasitasnya			
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	20 unit usaha	20 unit usaha	100
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140 unit usaha	50 unit usaha	35,71
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 unit usaha	50 unit usaha	125
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100%	100%	100%

- ❖ Jumlah koperasi berkualitas di tahun 2024 sebanyak 20 koperasi dari target 20 koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. (*terlampir*)
 - ❖ Jumlah UKM yang Berdaya Saing capaian 43 UKM dari target 140 UKM .
UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan bank Indonesia.
 - ❖ Nilai SAKIP Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo Tahun 2024 yaitu 79,46
- Pencapaian indikator kinerja yang dikemukakan hanya bisa tercapai jika didukung oleh pendanaan yang memadai yang ditunjang dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran

kegiatan dalam mencapai sasaran. Pendanaan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2024.

2. Program dan Kegiatan

Pagu Awal Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 6 (enam) program berjumlah sebesar Rp. 32.538.964.016,-. Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2024, urusan koperasi usaha kecil menengah melakukan revisi-revisi pada beberapa item belanja di 4 (empat) program dengan total sebesar (Rp. 887.510.000,-) dan pada APBD-P sebesar (Rp. 451.115.000,-) Sehingga di akhir tahun 2024 pagu anggaran urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui sumber dana APBD berjumlah sebesar Rp. 31.200.339.016,- dengan total realisasi sebesar Rp. 31.055.710.021 dan silva Rp. 144.628.995,- Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana DID, dengan rincian :

- a. Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 2.710.000.000,- berupa Bantuan Bahan Produksi/Olahan (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu dan Susu Kental Manis) bagi UMKM (Kios/Warung Makan, Usaha Kue Kering/Basah dan Usaha Aneka Minuman) pada program Pengembangan UMKM.

Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

Adapun dari total Pagu Anggaran Tahun 2024 setelah perubahan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 31.200.339.016,- rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 9.691.630.216,-
- Belanja Belanja Modal Rp -
- Belanja Barang & Jasa Rp. 21.508.708.800,-

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 31.055.710.021,-**

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan koperasi usaha kecil menengah tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024
(Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keuangan		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.538.964.016	31.200.339.016	31.055.710.021	100	94,89		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71		
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89	Fisik tidak mencapai 100% karena terdapat belanja fotocopy senilai Rp. 504.000,- yang tidak direalisasikan	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keuangan		
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89		
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89		
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	100	98,59	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	100	98,59		
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	132.000.000	158.400.000	157.908.000	100	99,69		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.135.183.250	1.117.427.035	100	98,44		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99		
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keuangan		
Teknologi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.615.353.291	12.388.303.291	12.338.992.758	100	99,60	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.472.275	489.736.075	488.758.974	100	99,80		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.913.275	271.551.075	270.838.678	100	99,74		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.559.000	218.185.000	217.920.296	100	99,88		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.979.666	9.753.272.966	9.721.559.062	100	99,67		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.077.130.216	9.691.630.216	9.659.965.973	100	99,67		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.849.450	61.642.750	61.593.089	100	99,92		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.632.000	469.510.000	468.234.790	100	99,73		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	553.632.000	469.510.000	468.234.790	100	99,73		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	100	99,08		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	100	99,08		

**pencapaian realisasi keuangan dibawah target 100% karena masih terdapat sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi*

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, maka total anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setelah perubahan adalah sebesar Rp. **31.200.339.016,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.063.393.248,-** atau sebesar 75,98%. Dengan realisasi sebesar Rp. **31.055.710.021,-** atau sebesar 76,08 % dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. **40.817.064.768,-**

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2024 urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan **Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel**

Jumlah anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp. 77.755.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.523.325,- adapun total silva sebesar Rp. 232.150,- (sisa pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa)

Outcome adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan capaian 20 koperasi.

Output Kegiatan ini adalah :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada 25 koperasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 20 Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota.

- b. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Provinsi Gorontalo untuk menyatukan persepsi pemahaman tentang Peraturan Perkoperasian dan Pengawasan Koperasi bagi Pembina Koperasi sebanyak 40 orang, dengan menghadirkan Narasumber Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- c. Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri

Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputy/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.

Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Sehat
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Sehat
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Sehat
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	Simpan Pinjam	Sehat
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	Simpan Pinjam	Sehat
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Sehat
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Sehat
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	Simpan Pinjam	Sehat
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Sehat
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Sehat

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Sehat
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Cukup Sehat
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Cukup Sehat
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Cukup Sehat
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Cukup Sehat
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No.AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Cukup Sehat
17	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Cukup Sehat
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Cukup Sehat
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Cukup Sehat
20.	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 08 Mei 2023	Jasa	Cukup Sehat

Tabel 1.4
Daftar Pengawasan dan Pemeriksaan/Monev Koperasi di Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPDK	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26 TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Pengawasan dan Pemkes
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No. AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
17.	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
20.	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 08 Mei 20223	Jasa	Pengawasan dan Pemkes
21.	KOPERASI PEMASARAN TINDAHO BONE BOLANGO	AHU-0011889.AH.01.26.Tahun 2021 Tgl. 3 November 2022	Pemasaran	Pengawasan
22.	KOPERASI KONSUMEN SARIPI ALIYA MANDIRI	AHU-0002144.AH.01.29 TAHUN 2023 Tgl. 05 Juni 2023	Konsumen	Pengawasan
23.	KOPERASI KONSUMEN TANI NUSANTARA MANDIRI	AHU-0012526.AH.01.26.TAHUN 2021 Tgl. 2 Oktober 2021	Konsumen	Pengawasan
24.	KOPERASI SIMPAN PINJAM PELITA (Primer Kab.Boalemo)	1691/BH/V Tgl. 30 Desember 1971	S. Pinjam	Pengawasan/ Monev bantuan
25.	KOPERASI SERBA USAHA TIRTA MALEO (Primer Kab. Pohuwato)	38/BH/VIII/2007 Tgl. 08 Agustus 2007.	Konsumen	Pengawasan/ Monev bantuan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha *Outcome* program ini adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (target 20 Unit usaha, capaian 20 unit usaha).

Pagu awal sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 670.416.750,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- (belanja bahan cetak, makan minum aktivitas lapangan, tambahan honor PTT dan perjalanan dinas biasa). Sehingga pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 675.696.750,-. Adapun realisasi hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp. 674.952.700,- Silva kegiatan berjumlah Rp. 744.050,- (belanja bahan cetak Rp.504.000, sisa perjalanan dinas biasa, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja kertas serta belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

Pelaksanaan Program/ kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi (Bedah) Koperasi dilaksanakan di Kabupaten /Kota Se-Provinsi Gorontalo sebanyak 9 Koperasi.

NO	NAMA KOPERASI	LOKASI	JENIS KOPERASI
1	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
2	KSU BUHUTA WAWU WAALAMA	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
3.	KOPERASI SIMPAN PINJAM FAJAR PESISIR	Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo	S.Pinjam
4.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo	Konsumen
5.	KOPERASI SINAR MANDIRI SENSEI	Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	Jasa
6.	KOPERASI HULAWA TINELO LIPU	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten	Produsen

NO	NAMA KOPERASI	LOKASI	JENIS KOPERASI
		Gorontalo Utara	
7.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO CERIA BERSAMA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen
8.	KOPERASI PRODUSEN HULAWA BINA MANDIRI	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
9.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO INDAH JAYA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen

- b. Bantuan Dana Hibah Koperasi berupa uang kepada 3 (tiga) koperasi yaitu :
- ~ Koperasi Pinus Jaya Sejahtera Desa Mootilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo badan Hukum Nomor : 007425/BH/M.KUKM.2/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. NPHD nomor 202/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024
 - ~ Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, Kel. Huto'o Kec. Limboto badan Hukum 381/BH/DKPP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011. NPHD nomor 201/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024
 - ~ Koperasi Konsumen Saitama Mandiri Jaya, Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara. No Badan Hukum (BH) : AHU 0016221.AH.01.26. Tahun 2022. NPHD nomor 203/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024
- c. Honorarium tenaga Non ASN 1 orang x 12 bulan

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 475 orang.

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (target 390 orang, capaian 475 orang).

Dukungan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 1.649.855.250,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.574.724.942,- atau 95,45% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik.

Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD sebesar Rp. 105.264.750,- dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi DAK Non Fisik pada program ini sebesar Rp. 1.469.566.222,- (95,14% keuangan) sisa anggaran Rp. 75.130.308,- (belanja perjalanan dinas biasa, Belanja

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN. serta sisa belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

Total Jumlah Pagu DAK Non Fisik PK2UKM 2024 sebesar Rp. 2.675.525.000,- yang terbagi atas DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dan DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM UMKM sebesar Rp. 1.130.934.500,-

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Output kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan penunjang kegiatan berupa belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-kertas & cover, bahan komputer dan perjalanan dinas koordinasi evaluasi & pelaksanaan pelatihan SDM Koperasi
- b. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik PK2UKM).

Jumlah Pagu DAK Non peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi Rp. 1.469.566.222,- (95,14%), silva Rp. 75.014.278,-

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I berjumlah **Rp. 735.044.000.-** dan Tahap II berjumlah **Rp. 809.546.500.-**

Peningkatan kapasitas SDM Koperasi

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK tahun 2024, dilaksanakan 19 angkatan dengan jumlah peserta 475 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 112 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta
2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 19 Mei 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
4. Pelatihan Pengawasan Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 Juni 2024

5. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt Kab. Boalemo : 25 peserta
6. Pelatihan Nilai dasar Jati Diri II di Kab. Boalemo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 20 s.d 22 Juni 2024

7. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi III di Kab. Gorut : 25 peserta
8. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi IV di Kab. Pohuwato : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024

9. Pelatihan Akuntansi Koperasi III Di Kab. Pohuwato

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 18 s.d 20 September 2024

1. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt Kab. Pohuwato : 25 peserta
2. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Pohuwato : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 25 s.d 07 September 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Kab. Boalemo : 25 peserta
4. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Boalemo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024

5. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta
6. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Kab. Gorontalo Utara : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 November 2024

7. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta
8. Pelatihan Pengawasan Koperasi Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

9. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta
10. Pelatihan Kompetensi Bagi pengurus Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Outcome program adalah *jumlah UKM yang berdaya saing* (target 140 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM). adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,61% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM

Pagu anggaran 2024 setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 1.293.583.250,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 1.275.335.035,- dan silva sebesar Rp. 18.248.215,- . pagu anggaran ini dari anggaran induk Rp. 1.267.183.250,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan .

Pada program/kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Pagu anggaran setelah perubahan Rp. 158.400.000,- dari pagu induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 132.000.000,- dimana pada APBD-P terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan.

Output Kegiatan ini adalah :

Honorarium jasa tenaga pelayanan umum (tenaga konsultan pendamping PLUT) 5 orang selama 12 bulan dalam rangka pendampingan kepada para pelaku UMKM

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM).

Peningkatan kapasitas SDM UMKM

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2024 dilaksanakan 2 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 375 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi penyuluhan hukum bagi UMKM dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 150 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo.

Jumlah pagu Anggaran untuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM UKM Rp. 1.130.934.500,- penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah Rp. 1.113.260.700,- dengan persentase keuangan 98,43 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. 17.673.800,- (belanja bahan lainnya, makan minum aktivitas lapangan, honorarium narasumber, iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN, biaya perjalanan dinas biasa).

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kripik : 25 peserta
Di Kabupaten Boalemo
2. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering : 25 peserta
Di Kabupaten Boalemo
3. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering : 25 Peserta
Di Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Tanggal 13 Mei 2024

4. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Pohuwato : 50 peserta
5. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Boalemo : 50 peserta

Pelaksanaan Tanggal 29 s.d 31 Mei 2024

6. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue : 25 peserta
di Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 01 s.d 03 Juni 2024

7. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kripik : 25 peserta

Di Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 30 s.d 01 Juni 2024

8. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue : 25 peserta
Di Kab. Gorontalo Utara

Pelaksanaan Tanggal 29 Mei 2024

9. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Gorontalo Utara : 50 peserta

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 September 2024

1. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Boalemo

2. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 13 Oktober 2024

3. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 Peserta
Di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 12 s.d 14 Oktober 2024

4. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kab. Gorontalo Utara

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

5. Diklat Desain Baju & Menjahit bagi UMKM : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 11 Oktober 2024

6. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta
di Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 10 Oktober 2024

7. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 16.258.400.000,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain pada belanja barang untuk

dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 1.083.200.000,-) dan tambahan pada perjalanan dinas biasa Rp. 185.000.000,- sehingga total revisi 2024 pada program ini (Rp. 898.200.000,-).

Pada tahapan APBD-P hingga finalisasi APBD-P terdapat pengurangan anggaran pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 911.000.000,- dan tambahan Rp. 450.000.000,- (APBD-P) serta pada beberapa belanja lainnya yang bersesuaian dengan total pada APBD-P (Rp. 245.055.000,-). Sehingga total pagu program ini setelah perubahan Rp. 15.115.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.114.181.261,- (99,45% keuangan) dan silva Rp. 963.739,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo, berupa Bantuan Bahan Produksi, Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target kinerja 40 unit usaha, capaian 52 unit usaha)

Output kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.

Pagu induk untuk belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bantuan bahan produksi olahan bagi UMKM) ini sebesar Rp. 15.832.800.000,- dengan realisasi di tahap I Rp. 12.035.852.268,- (2.264 penerima). sisa anggaran Rp. 3.796.947.732,- kemudian terdapat revisi penyesuaian (tambah/kurang/program/kegiatan/sub kegiatan) sebesar Rp. 1.083.200.000,- berdasarkan surat persetujuan pergeseran an ggaran tanggal 06 Mei 2024 nomor 160/DPRD825/V/2024 sehingga sisa untuk tahap selanjutnya Rp. 2.713.747.732,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran Rp. 470.000.000- dan pada finalisasi APBD-P (Rp. 931.000.000). sehingga sisa pagu untuk belanja ini setelah

APBD-P Rp. 2.252.747.732,- dan diserahkan di tahap II. Adapun rekapan penerima bantuan Tahap I dan II Tahun 2024 :

Rekapan Penerima Bantuan Tahap I Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	4679
2	Kabupaten Gorontalo	3761
3	Kabupaten Boalemo	703
4	Kabupaten Pohuwato	468
5	Kabupaten Bone Bolango	533
6	Kabupaten Gorontalo Utara	1895
Total		12039

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	939
2	Kabupaten Gorontalo	719
3	Kabupaten Bone Bolango	470
4	Kabupaten Gorontalo Utara	136
Total		2264

- b. Benchmarking bagi pelaku UMKM yang diikuti oleh 20 pelaku usaha dari Kabupaten Boalemo ke Alverna Bakery, Lin's Bakery di Jakarta
- c. Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan UMKM di Provinsi Gorontalo
- d. Honorarium pelaksana kegiatan (3 orang)

11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pagu induk pada program ini sejumlah Rp. 12.615.353.291,- kemudian terdapat revisi anggaran total sebesar Rp. 10.690.000,- dan pada tahapan APBD-P (Rp. 237.740.000) sehingga total pagu setelah perubahan Rp. 12.388.303.291,- realisasi Rp. 12.338.992.758,- dan silva Rp. 49.310.533,- antara lain pada sub kegiatan

penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 31.664.243,-, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

❖ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen).
Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 84.913.275,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 186.637.800,- dari beberapa belanja di sub kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor dan sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Sehingga total pagu setelah perubahan sebesar Rp. 271.551.075,- dengan realisasi Rp. 270.838.678.-

Di tahun 2024 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP

Output dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II dan triwulan III Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah pendampingan pelaksanaan program kegiatan (standar kompetensi, pelayanan prima, pengelolaan ketersediaan barang)

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)
Pagu awal untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 129.559.000,- kemudian mendapat tambahan anggaran melalui revisi anggaran sebesar Rp. 77.466.000,- dan pada tahapan APBD-P 2024 senilai Rp. 11.160.000,- sehingga total pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 218.185.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 217.920.296,- dan Silva kegiatan berjumlah Rp. 264.704,- dari beberapa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,93%.

Di tahun 2024 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev stimulan bantuan bagi UMKM tahun 2023, Monev bantuan hibah koperasi tahun 2024, Monev kinerja BPSK di Provinsi Gorontalo, monev UKM yang berdaya saing, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah)

❖ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan). adapun pagu awal sub kegiatan ini Rp. 10.110.979.666,-. Di tahun 2024 pada tahapan APBD-P 2024 terdapat tambahan TPP bulan Desember Rp. 121.500.000,- dan penyesuaian gaji/TPP (Rp. 507.000.000,-) stotal pada APBD-P sejumlah Rp. (Rp. 385.500.000,-). Sehingga pagu akhir Rp. 9.691.630.216,- dengan realisasi Rp. 9.659.965.973,- silva Rp. 31.664.243,- yang terdiri dari sisa gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS, tunjangan jabatan PNS, Tunjangan beras PNS, tunjangan PPh, pembulatan gaji PNS serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan prestasi kerja

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target)

Pagu anggaran induk sub kegiatan ini Rp. 33.849.450,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian Rp. 27.793.300,-. Sehingga pagu setelah perubahan pada sub kegiatan ini sejumlah Rp. 61.642.750,- dengan realisasi Rp. 61.593.089,- dan silva Rp. 49.661,- dari sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan lagi.

❖ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang

Di Tahun 2024 kegiatan ini tidak mendapatkan porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah.

❖ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 31 paket, capaian 18 paket atau 58% karena keterbatasan anggaran)

Output kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer).

Pagu awal sebesar Rp. 553.632.000,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (115.122.000,-) dan pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 31.000.000,- (belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag) Sehingga pagu sesudah perubahan menjadi Rp. 469.510.000,-,- dengan realisasi Rp. 1.354.542.233,- Silva Rp. 3.866.867,-.

❖ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 1.736.269.350,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (Rp. 166.085.100,-) dan pada tahapan APBD-P tambahan anggaran sebesar Rp. 105.600.000,- (belanja jasa tenaga pelayanan umum 21 orangx2 bulan) sehingga pagu setelah perubahan Rp. 1.675.784.250,-,- realisasi keuangan Rp. 1.660.439.932,- silva Rp. 15.344.318,- (capaian fisik 100% dan keuangan 96,71%).

3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Hibah Kepada Koperasi	Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	~Untuk penguatan modal dan pengembangan serta pemberdayaan koperasi ~Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat
		Keputusan Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Nomor 800/DKUPP/27/I/2023 tanggal 09 Januari 2024 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Bantuan Hibah bagi koperasi di provinsi Gorontalo	Pedoman pelaksanaan hibah bagi koperasi di Provinsi Gorontalo
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 52/16/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan penerima hibah berupa uang kepada koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	Penetapan penerima hibah berupa uang kepada koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
2	Stimulan Pengembangan Produk Bagi UMKM	Petunjuk Teknis Bantuan Bahan Produksi/Olahan bagi UMKM Tahun 2024	Pedoman pelaksanaan kegiatan stimulan pengembangan produk bagi UMKM
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 57/16/I/2024 tentang penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah Dinas Kumperindag	Penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM

		Provinsi Gorontalo TA. 2024	
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 447/16/XI/2024 tanggal 07 November 2024 tentang penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	Penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra OPD tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Kumperindag Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	20 Kop	100
2	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 orang	475 orang	121,79
3	Jumlah Koperasi Aktif	20 unit usaha	20 unit usaha	100
4	Jumlah UKM yang berdaya saing	140 unit usaha	43 unit usaha	30,72
5	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 unit usaha	52 unit usaha	130

5. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Pansus merekomendasikan perlunya stimulan dan keberpihakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi, pemulihan ekonomi pasca covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya tapi pada political will daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah

Tanggapan

Di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memprogramkan stimulan bantuan bagi UMKM berupa bahan produksi yang telah direalisasikan di tahun 2024 kepada 14.303 UMKM (@Rp. 1.000.000,-) dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 14.288.600.000,- melalui program pengembangan UKM

Hal-hal lain yang dilaporkan

- Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan koperasi tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Koperasi Tahun 2024
(Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	20	100
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen	20	100
- Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	20	Dokumen	20	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	475	121,79
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	475	121,79
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	390	Orang	475	121,79

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	20	100
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
- Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	43	30,72
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250	Unit Usaha	525	165,1
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	250	Unit Usaha	525	165,1
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan	318	Orang	525	165,1
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	52	130
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40	Unit Usaha	50	125
- Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	14.303	35.757,5

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	15	150
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen	15	150
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	7	175
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	8	133
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	87	Orang	79	90,8
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang	79	90,8
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	-	-
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87	Orang	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31	Paket	18	58,07
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31	Paket	18	58,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	1	100
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Laporan	1	100

1. Pada urusan Koperasi UKM terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja karena tidak teranggarkan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Perkembangan Koperasi selang Tahun 2023 - 2024 sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	2023				2024			
		Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)
1	KOTA GORONTALO	196	146	342	90	203	146	349	63
2	KAB. GORONTALO	356	78	434	60	360	79	439	51
3	KAB. BOALEMO	92	61	153	12	93	61	154	4
4	KAB. POHUWATO	98	37	135	9	102	37	139	8
5	KAB. BONE BOLANGO	107	58	165	31	108	58	166	24
6	KAB. GORONTALO UTARA	95	40	135	13	56	80	136	14
7	PROV. GORONTALO	98	14	112	30	110	13	123	24
	JUMLAH	1402	434	1476	245	1023	474	1506	188

Perkembangan koperasi sejak tahun 2023-2024 mengalami pasang surut terlebih untuk koperasi yang melaksanakan RAT. Hal ini disebabkan karena :

- a. Ketersediaan modal koperasi sangat terbatas
- b. Sulitnya koperasi mengakses modal untuk pengembangan usaha
- c. Keterbatasan SDM pengelola koperasi
- d. Pasca covid-19 berdampak pada seluruh pelaku-pelaku usaha termasuk koperasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini yaitu :

- a. Pemerintah telah melaksanakan restrukturisasi usaha dan akses permodalan
- b. Pemerintah telah membuka peluang usaha terhadap koperasi untuk membangun kemitraan lagi kepada seluruh stakeholder
- c. Pemerintah mengupayakan peningkatan SDM melalui pelatihan perkoperasian
- d. Pemerintah telah memprogramkan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui program pembinaan, penyuluhan, FGD dan bedah koperasi serta hibah koperasi untuk pengembangan KUKM kedepan pasca pandemi covid-19

Tahun 2024 kemudahan-kemudahan tersebut mulai diberikan kepada pelaku usaha agar koperasi dapat menuju koperasi modern dan UKM Naik kelas.

3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, memerlukan SDM Pengawas yang paham dan mengerti aspek pengawasan, namun saat ini masih terbatasnya anggaran dan pengetahuan SDM/ASN pengawas dan pemeriksa koperasi baik Kabupaten/Kota dan

Provinsi Gorontalo terutama dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan koperasi, sehingga pelaksanaan pengawasan belum maksimal.

4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan koperasi terdapat permasalahan yang hampir sama pada koperasi, antara lain :
 - Belum dilakukannya tata kelola administrasi yang baik oleh pengurus, pengawas maupun pengelola terkait dengan daftar anggota, struktur pengurus, struktur pengawas termasuk tugas dan tanggungjawabnya serta menyangkut perizinan usaha dan masalah data keuangan.
 - Belum melaksanakan kewajibannya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi dalam Rapat Anggota Koperasi
5. Ditahun 2022 telah tersedia aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo "SiapAku". Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date. Akan tetapi di Tahun 2023 dan 2024 tidak teranggarkan untuk biaya up dating data yang akan melibatkan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

6. Tugas Pembantuan / Penugasan dan Dekonsentrasi

Tahun 2024 urusan Koperasi UKM hanya menerima anggaran pelaksanaan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi dan tidak menerima anggaran melalui tugas pembantuan dan penugasan

a. Dana Dekonsentrasi yang diterima meliputi :

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi Nomor : SP DIPA - 044.01.3.310055/2023

2. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas

Alokasi anggaran dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Dalam Pelaksanaan dekonsentrasi Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 1.049.154.000,- melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi. Ditahun 2024 terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak didapat dilaksanakan karena status blokir dari pusat yaitu kegiatan diklat ODS senilai Rp. 427.160.000,- dan revisi lainnya dengan total Rp. 434.660.000,- sehingga total pagu awal menjadi Rp. 1.483.814.000,- kemudian pemotongan anggaran dari pusat pada kegiatan Harkonas senilai Rp. 61.608.000,- sehingga pagu menjadi Rp. 1.422.206.000,-. Kemudia di tahun 2024 juga terdapat blokir anggaran dari pusat senilai Rp. 465.447.000,- (tidak dapat digunakan lagi). Sehingga yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 956.759.000,-. Total realisasi Rp. 952.469.760,-

Tabel 1.7
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	CAPAIAN TAHUN 2024	
			KEUANGAN	PERSENTASE
Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1.049.154.000	956.759.000	952,469,760	99,55 %
Promosi Produk UMKM Provinsi	109,280,00	109,280,000	108,105,100	98.93 %
Fasilitasi dan Pembinaan Koperas	466,050,000	466,050,000	464,543,000	99.68 %
Perencanaan dan Penganggaran	381.429.000	381.429.000	379,821,660	99.58

a. Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

Penyediaan sarana penunjang bagi pengelola anggaran satuan kerja, operasional pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KUKM dan monitoring evaluasi kegiatan strategis

Kinerja :

Dana (Input) : Alokasi anggaran setelah revisi untuk Kegiatan ini sebesar

Rp. 370.106.000 dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 952,469,760 (99,50 %)

Keluaran (Output) : Honorarium pengelola anggaran, keikutsertaan pada rapat koordinasi nasional, rapat penyusunan anggaran dekonsentrasi, rapat pengelola anggaran (SAI), monitoring dan evaluasi kegiatan strategis (koordinasi ke pusat)

Hasil (Outcome) : Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan strategis, terlaksananya perencanaan program kementerian koperasi dan UKM, tersedianya honorarium pengelola keuangan

b. Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro melalui Dukungan pemberdayaan daerah melalui pendampingan PLUT, Pendampingan dan pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi melalui promosi KUKM SMESCO

Kinerja :

Dana (Input) : Alokasi Dana untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 109,280,00,- dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 108,105,100 (99.68 %)

Keluaran (Output) :

- Fasilitasi operasional konsultan pendamping dan pengelola PLUT KUMKM Gorontalo (perjalanan dinas pendamping PLUT)
- Dukungan perencanaan SDM KUKM (keikutsertaan pada pelaksanaan RATEKCAN, Rapat Koordinasi ke Kementerian, Pelaksanaan Rakorda, Bimbingan Teknis Perencanaan)
- Pendampingan Promosi KUKM SMESCO (Expose produk unggulan KUKM daerah di SEMSCO

Hasil (Outcome) : Peningkatan daya saing KUKM di daerah melalui pendampingan PLUT, Tersedianya fasilitas promosi produk KUKM unggulan Provinsi Gorontalo di SMESCO Jakarta

c. Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

Penyediaan data dan informasi publik (sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM) yaitu sistem data UMKM yang terintegrasi mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sehingga tercipta data yang valid serta Pemetaan potensi

kewirausahaan daerah

Kinerja :

Dana (Input) : Alokasi anggaran induk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.049.154.000,- kemudian direvisi sehingga total anggaran menjadi Rp. 370.106.000,- dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 952,469,760,- (99,50 %)

Keluaran (Output) :

- Pengembangan Data Koperasi dan UKM
yaitu koordinasi/sinkronisasi tingkat provinsi, koordinasi/sinkronisasi tingkat Kabupaten/Kota, Bimtek TOT penggunaan aplikasi SIDT tingkat Provinsi (peserta kabupaten/kota), Bimtek Enumerator penggunaan aplikasi SIDT tingkat Kabupaten/Kota (peserta Enumerator), Honor pengumpulan data tingkat provinsi, honor pengumpulan data tingkat kabupaten/kota, honor pengumpulan data dan honor penanggungjawab pengelola keuangan

Hasil (Outcome) :

- Tersedianya data dan informasi publik (sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM) untuk pengembangan data koperasi dan UKM
- Terpetakannya potensi kewirausahaan Provinsi Gorontalo
- Tersedianya Honorarium pengumpul data dan penanggungjawab pengelola keuangan

d. Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

- Penguatan SDM KUKM melalui pendampingan
- terselenggaranya layanan pengelolaan jabatan fungsional,
- Terselenggaranya sosialisasi kelompok usaha produktif masyarakat di kalangan kelompok strategis untuk membentuk koperasi pada pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawasan koperasi

Kinerja :

Dana (Input) :

Alokasi Dana untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 466,050,000,- dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 464,543,000 (99.68 %)

Keluaran (Output) :

- Pendampingan SDM KUKM melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yaitu berupa Pembayaran honorarium dan transport lokal Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 12 orang serta koordinator petugas penyuluh koperasi lapangan dan ATK
- Penguatan Pendampingan Pengawasan Koperasi yaitu operasional pelaksanaan pengawasan koperasi, honorarium pelaksanaan pengawasan koperasi di provinsi/kabupaten/kota, perjalanan dinas pelaksanaan pengawasan koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan koperasi

Hasil (Outcome) :

- Tersedianya honor dan transport bagi petugas penyuluh Koperasi Lapangan 12 orang serta koordinator petugas penyuluh lapangan
- Terlaksananya pengawasan, pemeriksaan/penilaian kesehatan koperasi di Provinsi Gorontalo

4. Permasalahan dan solusi

❖ **Permasalahan**

1. Koordinasi antar sektor dalam hal pembinaan pengembangan dan pemberdayaan KUKM belum optimal, SDM pengelola koperasi sangat terbatas menyebabkan realisasi pelaksanaan RAT koperasi masih sangat rendah,
2. Anggaran yang tidak tersedia untuk penyelenggaraan monitoring bagi pelaku usaha yang telah terdata setiap tahun dan telah menrima fasilitasi baik dalam bentuk pelatihan maupun keikutsertaan pada pameran-pameran sebagai bahan evaluasi keberlangsungan usaha KUKM di daerah dan permasalahannya

❖ **Solusi**

1. Perlu dilakukan bimbingan dan pengawasan khusus dalam pengelolaan dan manajemen perkoperasian serta peningkatan SDM koperasi sehingga akan meningkatkan minat masyarakat terhadap perkoperasian di Provinsi Gorontalo
2. Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan monitoring bagi pelaku usaha sebagai bahan evaluasi keberlangsungan usaha KUKM di daerah dan permasalahannya serta sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD

lebih di tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor Koperasi dan UKM

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

II. URUSAN INDUSTRI

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai OPD

Tujuan yang akan dicapai pada urusan industri yaitu Meningkatnya "Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian"

b. Sasaran dan Program

Data Capaian Indikator Kinerja urusan industri pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

N O	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,84%	0,38%	45,24%
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dok	36 Dok	100
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dok	- Dok	-
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dok	- dok	-

Indikator kinerja urusan industri “Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah ” Tahun 2024 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2024 = 13.260 IKM

Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM

- Jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023 sejumlah 10.039 IKM (tercantum pada LKPJ 2023). Hasil updating per Januari 2024 sejumlah 13.210.
- Jumlah industri tahun 2024 diperoleh dari data penumbuhan wirausaha baru ditahun 2024 yang dibiayai melalui dana Dekon karena terbatasnya anggaran untuk penumbuhan wirausaha baru melalui APBD 2024

2. Program dan Kegiatan

Pagu awal anggaran urusan industri adalah sebesar Rp. 1.861.808.250,-. Kemudian revisi anggaran (Rp. 209.090.000,-) dan pada tahapan APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 490.335.000,- sehingga total anggaran setelah perubahan tahun 2024 untuk program ini sebesar Rp. 2.143.053.250,-. Realisasi Anggaran pada program ini per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.138.595.744,- silva Rp. 4.457.506,-

Rincian Pagu Anggaran Tahun 2024 untuk urusan industri sebesar Rp. 3.500.429.405,- rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. -
- Belanja Belanja Modal Rp -
- Belanja Barang & Jasa Rp. 2.143.053.250,-

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan Perindustrian tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Industri
(Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo)
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Pagu 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keuangan		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79		
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.561.750	728.251.750	727.654.648	100	99,92		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.366.629.750	1.292.784.750	1.289.055.716	100	99,71		
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	106.616.750	122.016.750	121.885.380	100	99,89		

Berdasarkan tabel diatas maka total anggaran urusan industri setelah perubahan adalah sebesar Rp. **2.143.053.250,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2024 sebesar **Rp. 40.878.393.248,-** atau sebesar 5,24%. Dengan realisasi sebesar **Rp. 2.138.595.744,-** atau sebesar 5,24% dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 40.817.064.768,-

Ditahun 2024 pada urusan industri terdapat 2 (dua) program yang

tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah yaitu program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2024 urusan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri. adapun target Renstra 36 Dokumen. Tercapai

Pada program ini capaian fisik 100%, dan realisasi keuangan 99,79% karena terdapat sisa belanja yang tidak dimanfaatkan.

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (target 12 Dokumen, capaian 12 Dokumen).

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2024 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 728.251.750,- realisasi Rp.727.654.648,- dengan silva Rp. 597.102,- antara lain pada belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Adapun penganggaran induk APBD 2024 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 388.561.750,-. Kemudian terdapat revisi antar belanja pada sub kegiatan ini sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 342.780.000,- yang diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran Honorarium PTT (2 bulan) dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) Rp. 278.100.000,- serta perjalanan dinas Identifikasi verifikasi fasilitasi bantuan IKM untuk tahun 2024 sebesar Rp. 55.000.000,-.

Output kegiatan ini :

- a. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat bagi IKM Pangan dan Furniture yaitu Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan bagi 7 IKM pada pagu induk dan 12 penerima di APBD-P (*terlampir*)

Tujuan :

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
- Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkan peluang pasar lokal, regional dan nasiona

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 310.545.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 278.100.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 585.555.000,- realisasi Rp. 584.959.098,- . silva Rp. 595.902,-

- b. Verifikasi, Pengawasan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri Pangan dan Furniture yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing,

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu calon penerima bantuan IKM Pangan dan Furniture di Kabupaten/Kota

- c. Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pelayanan umum 2 orang

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen). Ditahun 2024 Pagu awal pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.366.629.750,- kemudian terdapat revisi sebesar (Rp. 206.000.000,-) yaitu pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan revisi tambah kurang pada item belanja bahan lainnya dan sewa bangunan gedung kantor. Pada tahapan finalisasi APBD-P tambahan anggaran Rp. 132.155.000,- (belanja barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 115.875.000, belanja jasa pelayanan umum 2 bulan Rp. 16.280.000,-, Sehingga total anggaran setelah perubahan pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 1.292.784.750,- realisasi Rp. 1.289.055.716,- silva Rp. 3.729.034,- Anggaran ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada uraian dibawah ini.

Output kegiatan ini adalah :

1. Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 23 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri sandnag, aneka dan kerajian serta IKM logam mesin.

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 674.650.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 115.875.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 584.525.000,- realisasi Rp. 582.159.628,- silva Rp. 2.365.372,-

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan

2. Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.

Pengembangan industri kerajinan daerah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

3. Pameran dan Rakernas Dekranas

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Nusantara "Kriya Nusa 2024" di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) DEKRANAS Tahun 2024.
- Tujuan Pameran Kriyanusa 2024 yaitu untuk memfasilitasi perajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinannya serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia akan produk kerajinan Indonesia, selain itu sebagai ajang pembelajaran bagi para perajin untuk memperhatikan produk-produk yang dipamerkan.
- Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional.

Sasaran yaitu Pelaku industri kerajinan sebanyak 3 orang

4. Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan kemampuan SDM IKM yang berdaya saing

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu semua pelaku industri kerajinan.

Kegiatan Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo meliputi:

- Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo senilai Rp. 300.000.000,- Nomor NPHD 351/DKUPP/IV/2024 tanggal 25 April 2024
- Honor Tenaga Non ASN yang merupakan Penjaga Galeri dan Tenaga Administrasi Dekranasda sebanyak 2 orang

➤ **Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**

Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (12 Dokumen)

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 106.616.750,- kemudian ditahapan APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 15.400.000,- Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 122.016.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.885.380,- (99,07% keuangan, fisik 100%)

Output kegiatan ini adalah :

- e. Verifikasi, pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Pelaksanaan kegiatan

Terwujudnya IKM yang mandiri dan berdaya saing, maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Belanja Barang Atau Jasa yang Diserahkan bagi IKM	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah belanja barang yang diserahkan Tahun Anggaran 2024
2	Hibah Kepada Dekranasda	<p>Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Nomor 800/DKUPP/06/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan dana Hibah Bagi Dekranasda Provinsi Gorontalo</p> <p>Keputusan Gubernur Nomor 153/16/IV/2024 tentang Penetapan penerima Hibah berupa uang kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo melalui program perencanaan dan pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan Penerapan Evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024</p>	Dalam upaya pengembangan industri kerajinan melalui Dekransda Provinsi Gorontalo.

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra OPD tahun 2024-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Industri
Dinas Kumperindag Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024			Keterangan
		Target	Realisasi	Persentase (%)	
1	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dok	36 Dok	100	
2	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dok	- Dok	-	Tidak mendapat porsi anggaran di 2024 karena keterbatasan fiskal daerah
3	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industr	12 Dok	- Dok	-	Tidak mendapat porsi anggaran di 2024 karena keterbatasan fiskal daerah

5. Tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Di tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti/ditanggapi

Hal-hal lain yang dilaporkan

- Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan Berdasarkan tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Industri Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja 2024	Persentase (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	36	100
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dokumen	36	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dokumen	12	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen	12	100
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	12	Dokumen	12	100
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin yang di fasilitasi & Dievaluasi	1	Dokumen	-	-
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dokumen	--	-
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri besar; 2) Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, 3) Kawasan Industri, dan perizinan perluasan kawasan Industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas daerah	1	Dok	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja 2024	Persentase (%)
	<i>Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dokumen	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	-	-
- Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	1	-

- a. Di tahun 2024 terdapat 2 (dua) program karena keterbatasan fiskal daerah, maka tidak teranggarkan sehingga yang tidak mencapai target kinerja yaitu program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional
- b. Pada sub kegiatan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terdapat anggaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut yaitu :

sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 517.305.000
APBD Induk (setelah revisi) 2024:	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan : .	239.205.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (7 IKM) @ Rp. 23.175.000,-	162.225.000
~ Fasilitasi Pemasangan Listrik 3 IKM @ Rp. 3.000.000,-	9.000.000
~ Fasilitasi Tempat Usaha 3 IKM @ Rp. 22.660.000,-	67.980.000
APBD-P 2024 :	

Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	278.100.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (12 IKM) @ Rp. 23.175.000,-	278.100.000
sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Rp. 584.345.000
APBD Induk (setelah revisi) 2024:	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	468.470.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (18 IKM) @ Rp. 23.175.000,-	417.150.000
~ Fasilitas Pemasangan Listrik 2 IKM @ Rp. 3.000.000,-	6.000.000
~ Fasilitas Tempat Usaha 2 IKM @ Rp. 22.660.000,-	45.320.000
APBD-P 2024 :	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	115.875.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (5 IKM) @ Rp. 23.175.000,-	115.875.000
Total	1.101.650.000

- f. Tahapan Penyusunan RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022. Adapun RPIK pada tahun 2023 telah tersusun 2 dokumen RPIK yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan progress hingga tahun 2024 masih ditahapan pengusulan PERDA.

6. Penghargaan nasional yang diterima OPD Provinsi Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk urusan Perindustrian tidak menerima penghargaan nasional

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan OPD Provinsi Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk urusan Perindustrian tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU

8. Tugas Pembantuan/Penugasan dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2024 urusan Industri menerima anggaran pelaksanaan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi dan tidak menerima anggaran melalui tugas pembantuan dan penugasan

a. Dana Dekonsentrasi yang diterima meliputi :

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- ~ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor 019.05.3-690772/2023 tanggal 24 November 2023

2. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas

Alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian

3. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
FASILITASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI				
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana	439.535.000	433.601.452	5.933.548	98,65
Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	180.048.000	180.048.000	-	100
Pelatihan IKM Pakaian Jadi di Kota Gorontalo	49.030.000	49.030.000	-	100
Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair dari Air Kelapa Di Kabupaten Pohuwato	63.620.000	63.620.000	-	100
Pelatihan Bagi Mekanik IKM Bengkel Motor di Kota Gorontalo	52.548.000	52.548.000	-	100
Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi IKM di Kab/Kota	14.850.000	14.850.000	-	100
Sinergitas Pembinaan Industri Melalui Tugas Pembantuan	259.487.000	253.553.452	5.933.548	97,71
Administrasi Kegiatan	50.420.000	49.912.842	507.158	98,99
Rakornas Penyusunan Program PIKM Tahun 2025	16.926.000	16.926.000	-	100
Rakornas Pengelolaan DIPA Tahun 2024	20.438.000	20.437.120	880	100
Pemantapan Bagan Akun Standar dan Sistem Penganggaran pada Aplikasi SAKTI	7.659.000	7.658.680	320	100
Penyusunan Pagu Definitif	19.662.000	19.662.000	-	100
Laporan Keuangan I	5.910.000	5.908.980	1.020	99,98
Laporan Keuangan 2	7.186.000	5.689.380	1.496.620	79,17
Workshop Pembayaran Melalui Aplikasi Digipay	6.641.000	6.641.000	-	100

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
Bimbingan Teknis BMN di Bandung	6.797.000	6.796.280	720	99,99
Bimtek Administrasi Keuangan	7.184.000	7.183.500	500	99,99
Bimtek Kegiatan Laporan Akhir Tahun Jawa Timur	12.926.000	12.323.360	602.640	95,34
Sosialisasi Monev (Online)	6.521.000	6.521.000	-	100
Rekonsiliasi Data 1	24.192.000	21.470.430	2.721.570	88,75
Penyusunan Program Kegiatan Tugas Pembantuan 2025 Jawa Barat	12.840.000	12.807.360	32.640	99,75
Koordinasi Pusat	14.075.000	13.506.960	568.040	95,96
Partisipasi Promosi Unggulan IKM di Jakarta	40.110.000	40.108.560	1.440	100
IKM Yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	182.827.000	182.427.000	400.000	99,78
Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merek, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka Ovop	182.827.000	182.427.000	400	99,78
Diversifikasi Produk Pangan dari Pisang di Kab. Gorontalo	86.663.000	86.663.000	-	100
Dalam Rangka Pembinaan OVOP Di Kabupaten/Kota	26.998.000	26.998.000	-	100
Pelatihan Pengembangan IKM Furniture di Provinsi Gorontalo	47.406.000	47.406.000	-	100
Sosialisasi Penerapan TKDN di Provinsi Gorontalo	21.760.000	21.360.000	400.000	98,16
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
Layanan Pemberdayaan Penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL)) Melalui Tugas Pembantuan	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
Dalam Rangka Pembinaan IKM Oleh UPL	78.362.000	78.212.000	150.000	99,81
FGD Pendataan IKM dan SIINAS di Kota Gorontalo	34.106.000	29.195.368	4.910.632	85,60
Sosialisasi dan Bimbingan Pendataan IKM Kepada Industri Kecil	34.356.000	33.859.280	496.720	98,55
Partisipasi dan Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui SIINAS	11.500.000	11.498.760	1.240	99,99
Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM di Kota Gorontalo	42.780.000	42.780.000	-	100
Kunjungan Lapangan Untuk Sampling dan Verifikasi Pendataan Sentra DAK BPS	11.850.000	11.700.000	150.000	98,73
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Layanan Perkantoran	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Honorarium Pengelola DIPA	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Total Belanja	894.476.000	867.583.860	26.892.140	96,99

4. Permasalahan dan solusi

Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan dan pendampingan terhadap industri kecil menengah (IKM) berikut beberapa saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan :

1. Meningkatkan Akses Terhadap Modal

- Saran : Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh IKM, dengan bunga yang terjangkau dan tanpa jaminan yang memberatkan. Selain itu, program bantuan modal usaha berbasis hibah atau pinjaman lunak untuk IKM perlu diperluas.

- Tindak Lanjut : Menyusun skema pembiayaan khusus untuk IKM, serta memberikan pelatihan kepada pelaku IKM mengenai cara mengakses pembiayaan, termasuk penggunaan sistem digital untuk memudahkan pengajuan kredit.
2. Pelatihan Keterampilan Manajerial dan Bisnis
- Saran : Program pelatihan manajerial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha, pemasaran dan pengelolaan keuangan.
 - Tindak Lanjut : Menyelenggarakan pelatihan rutin yang berfokus pada peningkatan keterampilan bisnis dasar, seperti manajemen keuangan, pemasaran digital dan pengelolaan SDM. Pelatihan ini harus mudah di akses dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis usaha.
3. Peningkatan Akses ke Pasar
- Saran : Menyediakan akses pasar yang lebih luas melalui pengembangan platform digital, serta mendorong kerjasama antara IKM dengan pelaku industri besar atau sektor swasta.
 - Tindak lanjut : Membentuk jejaring pasar melalui pameran, bazar atau marketplace online yang memfasilitasi produk IKM. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan e-commerce untuk membantu IKM memasarkan produk mereka secara efektif.
4. Penerapan Teknologi dan Inovasi
- Saran : Memberikan insentif bagi IKM yang berinvestasi dalam teknologi baru dan proses inovasi. Juga penting untuk menyediakan pelatihan tentang penerapan teknologi yang tepat guna di sektor IKM.
 - Tindak lanjut : Melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi, seperti mesin produksi modern, perangkat lunak manajemen usaha dan teknologi digital untuk

pemasaran. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk subsidi teknologi bagi IKM.

5. Simplifikasi Regulasi dan Perizinan

- Saran : Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan usaha dan memberikan panduan yang jelas tentang regulasi yang berlaku bagi IKM, serta membentuk sistem layanan terpadu untuk mempermudah akses informasi.
- Tindak lanjut : Membentuk pusat pelayanan satu atap untuk memfasilitasi IKM dalam memperoleh izin usaha dan memenuhi regulasi yang ada. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan yang lebih ramah bagi IKM, termasuk kemudahan dalam pengurusan izin dan pajak.

6. Meningkatkan Pendampingan dan Mentoring

- Saran : Program pendampingan yang lebih berfokus dan berkelanjutan dapat membantu IKM dalam menghadapi tantangan bisnis. Mentor yang memiliki pengalaman praktis sangat dibutuhkan.
- Tindak Lanjut : Meningkatkan jumlah pendamping atau mentor yang ahli dalam bidang IKM. Pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik IKM dan dilakukan secara berkala, serta memastikan mentor memberikan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha.

7. Peningkatan Infrastruktur

- Saran : Pemerintah harus memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan IKM, seperti jalan, listrik, air dan teknologi informasi.
- Tindak lanjut : Melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor IKM, seperti akses transportasi yang lebih baik dan ketersediaan internet yang cepat dan murah. Pembangunan ini dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah dengan konsentrasi IKM yang tinggi.

8. Kolaborasi Antar Pihak

- Saran : Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas IKM harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan IKM.
- Tindak lanjut : Membentuk forum atau wadah kolaborasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk saling berbagi informasi, pengalaman dan sumber daya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh IKM.

Dengan melakukan tindak lanjut tersebut, diharapkan IKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, memiliki daya saing yang kuat dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional

3. URUSAN PERDAGANGAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai OPD

Tujuan yang akan dicapai pada urusan perdagangan yaitu “*Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian*”

b. Sasaran dan Program

Data Capaian Indikator Kinerja pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024
Urusan Perdagangan

NO	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
1	Sasaran :	Tujuan : <i>Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian</i>			
	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	~ Jumlah Nilai Ekspor	\$14.807.701,00	\$52.967.332,45	357,70
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	28 Laporan	43 Laporan	153,58

NO	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7 Komoditi	8 Komoditi	Program ini tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah untuk melaksanakan kegiatan pendukung
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7 Dokumen	7 Dok	

- Jumlah Nilai Eksport Tahun 2023 berjumlah \$37.959.205 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo.
- Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting
- Tahun 2024 terdapat 1 program yang tidak mencapai target kinerja karena tidak teranggarkan di tahun 2024 (keterbatasan fiskal daerah) yaitu program pengembangan export

2. Program dan Kegiatan

Total Pagu setelah perubahan 2024 untuk urusan Perdagangan sebesar Rp. 7.720.000.982,- dengan realisasi Rp. 7.622.759.003,- (capaian fisik 99,99% dan keuangan 96,23%) dan silva Rp. 97.241.979,-

Ditahun 2024 untuk urusan perdagangan melaksanakan 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan. Pagu awal untuk urusan perdagangan ini sebesar Rp. 2.920.037.100,- kemudian revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,- pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, makan minum aktifitas lapangan. Pada tahapan APBD-P 2024 sebesar Rp. 1.982.680.000,- yaitu pada kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan sebesar Rp. 1.427.180.000,- dan kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Rp. 555.500.000,-

Pada tahun 2024 Anggaran pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi telah ditagging melalui sumber dana IF berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Insentif Fiskal IF (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 sebesar Rp. 3.774.379.000,- dan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/6996/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 tentang penggunaan sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,-

Tagging anggaran ini tidak menambah anggaran pada sub kegiatan yang dimaksud. Tagging anggaran sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,- Tagging anggaran sebesar Rp. 1.793.752.085,- akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini.

Total Pagu Anggaran Tahun 2024 setelah perubahan urusan perdagangan adalah sebesar Rp. 7.720.000.982,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp -
- Belanja Barang/Jasa Rp. 7.720.000.982,-
- Belanja Modal Rp --

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.622.759.003,-

Adapun Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan pada urusan Perdagangan tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan
 (Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo). Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.920.037.100	7.720.000.982	7.622.759.003	100	96,23		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49		
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	100	98,85	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	100	98,85		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	103.400.000	124.080.000	123.978.000	100	99,92		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)		
Kabupaten/Kota							
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.370.800.100	5.594.583.982	5.528.912.227	100	98,83		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.416.220.250	1.971.720.250	1.940.401.656	100	98,81	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	emanfaatan anggaran tahun lanjutnya cara maksimal
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	100	98,29		
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	100	98,29		
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	123.166.750	122.853.360	100	99,75		
Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.322.000	53.134.150	100	99,65		
Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.844.750	69.719.210	100	99,82		
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.436.750	39.435.048	100	99,99		
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750	39.436.750	39.435.048	100	99,99		

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2024 urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen Surat keterangan asal dari* dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara. Target kinerja tidak tercapai karena 1 sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen tidak dilaksanakan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran sampai Desember 2024 sejumlah Rp. 29.616.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 29.467.120,- (99,29% keuangan dan 100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2024. Adapun silva pada program ini Rp. 149.630 pada beberapa belanja. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 9 dokumen, capaian 47 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pendataan pengawasan monitoring dan evaluasi ekspor di pelabuhan dan identifikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor di kabupaten/kota
- Tersusunnya data pelaku usaha/eksportir yang menggunakan SKA dan identifikasi permasalahan eksportir terhadap penggunaan aplikasi SKA

Adapun realisasi export tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rekap Realisasi Ekspor Berdasarkan Komoditi
Selang Bulan Januari – Desember 2024

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
1	MOLASES	32.634.272	5.496.316,65	KOREA	PT. PABRIK GULA GORONTALO
2	WOOD PELET	186.815.057	25.587.390,69	KOREASELATAN,JEPANG	PT. BIOMAS JAYA ABADI
3	SANTAN BEKU	473.503	473.503	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
4	MINYAK MENTAH	179.205	157.637,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
5	KELAPA PARUT	6.947.162	12.005.749,50	EROPA,CHINA,SAUDI ARABIA	
6	JAGUNG	32.900.000	9.120.637,50	FILIPINA	PT. SEGER AGRO NUSANTARA
7	IKAN	38.649,64	123.097,51	SINGAPURA MALAYSIA,JEPANG	
8	KEPITING	450,1	3.000,60	SINGAPURA, JEPANG	
	J U M L A H	259.988.299	52.967.332,45		

Tabel 3.4

Penerbitan SKA

Yang Dokumentasinya Telah Diterima dengan Lengkap dan Benar
Tahun 2024

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
1	05-Jan-24	0000001/GTL/2024	SKA-SB-2312-03/YCM038	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,GUANGDONG, CHINA

2	05-Jan-24	0000002/GTL/2024	SKA-SB-2312-05/YCM040	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
3	09-Jan-24	0000003/GTL/2024	INV.0280/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO. TOKYO 104-8429 JAPAN
4	19-Jan-24	0000004/GTL/2024	SKA-SB-2312-06/YCM041	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
5	22-Jan-24	0000005/GTL/2024	SKA-SB-2312-07/YCM042	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
6	30-Jan-24	0000006/GTL/2024	INV.006/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
7	01-Feb-24	0000007/GTL/2024	SKA-MP-2401-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
8	01-Feb-24	0000008/GTL/2024	SKA-SB-2401-03/YCM045	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
9	01-Feb-24	0000009/GTL/2024	SKA-SB-2401-01/YCM043	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
10	01-Feb-24	0000010/GTL/2024	SKA-SB-2401-04/YCM046	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
11	05-Feb-24	0000011/GTL/2024	SKA-SB-2401-02/YCM044	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
12	07-Feb-24	0000012/GTL/2024	003/FD-TLM/II/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
13	07-Feb-24	0000013/GTL/2024	005/FD-TLM/II/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
14	13-Feb-24	0000014/GTL/2024	INV.031/BJA/HAN/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
15	15-Feb-24	0000015/GTL/2024	SKA-SB-2401-05/YCM047	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
16	20-Feb-24	0000016/GTL/2024	SKA-SB-2401-08/YCM050	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
17	20-Feb-24	0000017/GTL/2024	SKA-SB-2401-07/YCM049	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
18	20-Feb-24	0000018/GTL/2024	SKA-SB-2401-06/YCM04 8	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
19	29-Feb-24	0000019/GTL/2024	SKA-MP-2402-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA

20	29-Feb-24	0000020/GTL/2024	SKA-SB-2402-01/YCM051	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
21	01-Mar-24	0000021/GTL/2024	INV.067/BJA/APB/III/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
22	19-Mar-24	0000022/GTL/2024	SKA-MP-2401-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
23	19-Mar-24	0000023/GTL/2024	SKA-SB-2402-03/YCM053	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
24	19-Mar-24	0000024/GTL/2024	SKA-MP-2402-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
25	19-Mar-24	0000025/GTL/2024	SKA-SB-2402-02/YCM052	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
26	20-Mar-24	0000026/GTL/2024	INV.093/BJA/HAN/III/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., TOKYO 104-8429 JAPAN
27	22-Mar-24	0000027/GTL/2024	SKA-SB-2402-04/YCM054	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
28	28-Mar-24	0000028/GTL/2024	SKA-SB-2403-02/YCM056	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
29	29-Apr-24	0000029/GTL/2024	INV.128/BJA/APB/IV/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
30	08-Mei-24	0000030/GTL/2024	SKA-SB-2404-01/YCM055	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO., GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA CHINA
31	13-Mei-24	0000031/GTL/2024	INV.052/BJA/ITC/V/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	ITOCHU CORPORATION, TOKYO, 107-8077, JAPAN
32	28-Mei-24	0000032/GTL/2024	SKA-MP-2404-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
33	14-Jun-24	0000033/GTL/2024	INV.190/BJA/APB/VI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
34	05-Jul-24	0000034/GTL/2024	SKA-MP-2405-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, TOWER WUHAN BUILDING, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
35	16-Jul-24	0000035/GTL/2024	INV.237/BJA/APB/VII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
36	02-Agu-24	0000036/GTL/2024		PT YASMIR	ROERIT MAHAYANTI

			01/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	GLOBALINDO UTAMA	RRUGA HAKI SHEHU 38, 1001 TIRANA
					ALBANIA
37	02-Agu-24	0000037/GTL/2024	02/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	PT YASMIR GLOBALINDO UTAMA	STEFANO BIAGGI, DANPROM SA VIA PAOLO TORRIANI 5, 6850 MENDRISIO SWITZERLAND
38	12-Agu-24	0000038/GTL/2024	SKA-SB-2407-01/YCM057	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO., GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
					CHINA
39	15-Agu-24	0000039/GTL/2024	INV.292/BJA/APB/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
40	26-Agu-24	0000040/GTL/2024	INV.327/BJA/HAN/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
41	27-Agu-24	0000041/GTL/2024	010/FD-TLM/VIII/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
42	13-Sep-24	0000042/GTL/2024	013/FD-TLM/IX/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
43	18-Sep-24	0000043/GTL/2024	INV.357/BJA/APB/IX/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
44	07-Okt-24	0000044/GTL/2024	INV.369/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
45	18-Okt-24	0000045/GTL/2024	INV.432/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
46	11-Nov-24	0000046/GTL/2024	INV.467/BJA/APB/XI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
47	16-Des-24	0000047/GTL/2024	INV.517/BJA/APB/XII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 43 Laporan yaitu 12 Laporan pemantauan harga dan 31 laporan pelaksanaan Operasi pasar

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

✚ Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 103.400.000,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 20.680.000,- sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 124.080.000,- dengan realisasi Rp. 123.978.000,- dengan realisasi keuangan 99,67% dan fisik 100% Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota

Pelaksanaan sub kegiatan :

1. Pemantauan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting yang dilaporkan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)
Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan harga barang pokok dan barang penting bertujuan untuk:
 - Mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik;
 - Mengantisipasi terjadinya kondisi yang mengganggu kegiatan perdagangan nasional, yang meliputi gangguan pasokan dan/atau kondisi harga barang pokok dan/atau barang penting berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan;
 - Mengetahui tingkat disparitas harga antar waktu dan antar wilayah;
 - Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga.

Pelaksanaan pemantauan harga tidak terlepas dari permasalahan teknis dan non teknis, seperti adanya perbedaan harga antara petugas pemantau harga di kabupaten kota dan provinsi terhadap pasar pantauan yang sama.

Sebagai upaya dalam menyamakan persepsi serta ketaatan/ketepatan waktu dan substansi materi terkait pelaporan pemantauan pasar dan harga barang kebutuhan pokok, maka diperlukan hal-hal diantaranya;

- Pelaporan terkait ketersediaan dan kondisi harga barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan yang terkonfirmasi dengan petugas dari dinas terkait di kota/kabupaten;
- Ketepatan data dan kepatuhan batas waktu pelaporan merupakan hal yang sangat penting, sehingga para petugas pendataan dan pelaporan harus benar-benar memperhatikan hal ini termasuk validitas datanya.

2. Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

Pemantauan ketersediaan dan stok barang kebutuhan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445H/2024M dilaksanakan tanggal 5 April 2024 di tiga gudang distributor yakni gudang PT Awet Sarana Sukses, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan PT Manggala Utama Distrindo. Dua gudang lainnya yakni di Hypermart Gorontalo dan gudang Bulog Sub Divre Gorontalo.

Berdasarkan peninjauan tercatat stok beras ada 850 ton, gula 920 ton. Minyak goreng 170 ton dan terigu 131 ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dengan harga yang stabil.

3. Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting

✚ Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 31 laporan dari target 4 laporan.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.370.800.100,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-

Revisi anggaran termasuk tambahan anggaran melalui IF periode 3 2023 sebesar Rp. 2.961.150.000,- berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Nomor : 160/DPRD/435/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yaitu Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat serta beberapa belanja lainnya yang bersesuaian.

Pada tahapan APBD-P 2024 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.406.500.000,- Adapun tambahan anggaran terdapat pada beberapa belanja antara lain belanja bahan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.327.195.000,-; belanja makan minum rapat, sewa alat kantor dan perjalanan dinas pendukung kegiatan.

sehingga total pagu sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp. 5.594.583.982,- dengan realisasi Rp. 5.528.912.227,- (99,02% keuangan, fisik 100%)

Ouput sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 laporan dan capaian 31 laporan pelaksanaan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2024 yang dilaksanakan 31 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 35.600 penerima.

Kegiatan fasilitasi Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) wilayah Gorontalo, dengan menyediakan produk antara lain Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Terigu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya Komoditi Beras, dengan pertimbangan harga beras yang terus meningkat, tidak diimbangi dengan pasokan yang mulai berkurang, ditambah peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan 1445.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya wilayah yang masuk dalam objek pantauan perhitungan inflasi daerah, dimana kegiatan ini akan turut mempengaruhi perhitungan inflasi nasional, yang meliputi wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sasaran Operasi Pasar adalah masyarakat umum, dan lokasi pelaksanaannya bertempat di pasar tradisional, yang buka secara mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

Lokasi kegiatan Operasi Pasar di fokuskan di 3(tiga) wilayah, antara lain : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Lebih spesifik lagi Operasi Pasar menyasar pada masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, mulai dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai.

Masyarakat diberikan kesempatan berbelanja sesuai dengan antriannya, dan dibatasi untuk setiap warga hanya dapat berbelanja maksimal 1 item/orang. Dalam giat ini, BULOG menyediakan produk beras SPHP ukuran 5 kg, dijual dengan harga Rp. 10.400/kg, Gula Pasir dijual dengan harga Rp. 18.000/kg, Minyak Goreng dijual dengan harga Rp. 14.000/liter, dan terigu dijual dengan harga Rp11.000/kg. Setiap hari OP dilaksanakan di 2(dua) lokasi pasar tradisional, dan terbatas hanya dapat melayani untuk 200(Dua Ratus) warga masyarakat.

b. Pasar Murah Bersubsidi

Pelaksanaan program dan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi atau yang juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pasar Murah Bersubsidi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dan menjual komoditi yang turut mempengaruhi inflasi yaitu:

- Beras kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp.25.000 atau @Rp.5.000/Kg;
- Gula Pasir kemasan 1 Kg dijual Rp.10.000/Kg.
- Minyak Goreng kemasan botol 1 liter dijual Rp.10.000/Liter;
- Telur kemasan 10 butir dijual Rp.10.000/pack atau @Rp.1.000/butir
- Cabai Rawit dikemas dalam tas 0,5 Kg atau 0,25 Kg dijual Rp.10.000
- Bawang Merah dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Bawang Putih dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Ayam Broiler dikemas dalam tas 1 Ekor dijual Rp 20.000
- Ikan Tuna dikemas dalam *vacum seal*/0,5 Kg dijual Rp.20.000/0,5 Kg

Untuk selang bulan Januari sampai dengan Desember 2024, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
1	09-Mar-24	SIMPANG 3 GORR TAPA DESA TALULOBUTU	TAPA	BONE BOLANGO	1500
2	10-Mar-24	KELURAHAN LIBUO	DUNGINGI	KOTA GORONTALO	1000
3	14-Mar-24	LAPANGAN DESA LUWOO	TALAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1500
4	26-Mar-24	KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1500
5	02-Apr-24	KEJAKSAAN TINGGI DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	2000
6	04-Apr-24	MAKO LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
7	06-Apr-24	POLDA GORONTAL DESA TULADENGGI	Telaga	KABUPATEN GORONTALO	1500
8	14-Apr-24	LAPANGAN DESA BULOTA	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1000
9	16-Apr-24	MAKOREM 133 NW DESA TRIDHARMA	Pulubala	KABUPATEN GORONTALO	1800
10	18-Apr-24	PESANTREN SALAFIYAH DESA BANUROJA	Randangan	POHUWATO	1000
11	22-Apr-24	KOMP. PERKEBUNAN KAKAO DESA POLOHUNGO	Dulupi	BOALEMO	1000
12	27-Apr-24	KEMENKUMHAM DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	1000
13	29-May-24	LAPANGAN DESA PANGGULO	Botupingge	BONE BOLANGO	1500
14	04-Jun-24	LAP. GARUDA PUTRA KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
15	05-Jun-24	AULA SERBAGUNA DESA MONGGUPO	Atinggola	GORONTALO UTARA	1500
16	05-Jun-24	KANTOR DESA MOLANTADU	Tomilito	GORONTALO UTARA	700
17	09-Jun-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1500
18	13-Jun-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	Sipatana	KOTA GORONTALO	1000
19	05-Jul-24	LAPANGAN DESA PENTADU	PAGUAT	POHUWATO	900
20	05-Jul-24	AULA DESA KARANGETANG	DENGILO	POHUWATO	300
21	05-Sep-24	LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	DUMBO RAYA	KOTA GORONTALO	600
22	14-Oct-24	ALUN ALUN TILAMUTA DESA LIMBATO	TILAMUTA	BOALEMO	1000
23	16-Oct-24	HAL. KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
24	19-Oct-24	KANTOR DESA PENTADIO BARAT	TELAGA BIRU	KABUPATEN GORONTALO	1000

TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
25	22-Oct-24	TELAGA PARK DESA BULILA	TELAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1000
26	24-Oct-24	LAP. BASULAPA DESA ISIMU SELATAN	TIBAWA	KABUPATEN GORONTALO	1000
27	29-Nov-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	LIMBOTO	KABUPATEN GORONTALO	1500
28	06-Dec-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	SIPATANA	KOTA GORONTALO	1000
29	12-Dec-24	LAPANGAN DESA HUIDU	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
30	14-Dec-24	STM/SMK 3 KEC. KOTA TENGAH	PULUBALA	KOTA GORONTALO	1000
31	18-Dec-24	GEREJA IMANUEL KEL. TENDA	HULONTHALANGI	KOTA GORONTALO	1300
Total					35.600

Dari tabel pelaksanaan diatas dapat dilihat bahwa perbandingan setiap pelaksanaan pasar murah bersubsidi dapat dirata-ratakan sebanyak 1000 penerima manfaat. Dan untuk sebaran pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di wilayah kabupaten kota dapat disajikan pada tabel berikut:

REKAPITULASI PER KAB/KOTA	PELAKSANAAN	PENERIMA
KOTA GORONTALO	8 KALI	7.900
KABUPATEN GORONTALO	12 KALI	15.300
BONE BOLANGO	4 KALI	6.000
POHUWATO	3 KALI	2.200
BOALEMO	2 KALI	2.000
GORONTALO UTARA	2 KALI	2.200
JUMLAH		35.600

Adapun banyaknya volume komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah bersubsidi yaitu sebagai berikut:

KOMODITI	VOLUME	SATUAN
BERAS	178.000	KG
MINYAK GORENG	35.600	LTR
GULA PASIR	35.600	KG
TELUR	356.000	BUTIR
BAWANG MERAH	17.800	KG
CABE RAWIT	17.175	KG
BAWANG PUTIH	500	KG
AYAM	4.500	EKOR
IKAN TUNA	500	PAKET/0,5 KG

- c. Pelaksanaan Intervensi Pasar terhadap Komoditi Beras di Pasaran
Yaitu subsidi harga terhadap komoditi beras bagi para pedagang pengecer beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan Pasar Kayubulan Kabupaten

Gorontalo mengingat harga beras di pasaran mencapai Rp. 17.000.-18.000/kg dan Rp. 14.000.-15.500/liter.;

Dalam upaya stabilisasi harga barang dan menyiapkan ketersediaan barang pokok yang cukup terjangkau bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 M (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN), serta mempertimbangkan harga beras di pasaran yang masih tinggi dan sebagai tindaklanjut terhadap Hasil Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 14 Maret 2024 guna stabilitas harga dan pasokan komoditas beras maka upaya dan langkah konkrit yang diputuskan pada pertemuan dimaksud untuk stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan pemenuhan barang kebutuhan pokok

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Outcome dari program ini adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 7 Komoditi, dan capaian 8 komoditi yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diekspor diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah)

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 Dokumen, Capaian 7 Dokumen.

❖ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen, capaian 297 kasus dari target 11 kasus

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.253.616.750-. kemudian terdapat tambahan anggaran melalui finalisasi APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain kekurangan honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK sebesar Rp.535.500.000,-. Dan perjalanan dinas Rp. 20.000.000,- Sehingga total pagu anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.809.116.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.778.113.248,- dan silva sebesar Rp. 31.003.502,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak ditagih lagi Rp. 31.000.000,- karena target kinerja anggota BPSK yang tidak tercapai. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 99,67%.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Jumlah Monitoring dan evaluasi BPSK di Kabupaten/Kota
- c. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 268 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 253 kasus antara lain tentang Pengaduan Klausula Baku, Pengaduan

permasalahan pembiayaan, liter/timbangan, penjualan LPG diatas harga Het, penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota/pembinaan). Harga yang tidak bersesuaian dengan pembelian

- d. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku:
- BPSK Kota Gorontalo, 40 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2023 jumlah kasus 34, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2024 jumlah kasus 108, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan/PLN
 - BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2024 jumlah kasus kausula baku/pembiayaan 29 yang diterima
 - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2024 jumlah kasus yang ditangani 33 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2024 jumlah kasus 24 yang diterima dan diselesaikan melalui konsiliasi-mediasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - Provinsi Gorontalo, terdiri atas 29 kasus antara lain 5 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko), 8 kasus LPG dijual diatas harga HET, 6 kasus makanan dan minuman yang sudah berjamur. 10 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian, Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan/mediasi

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pengujian dan sertifikasi mutu produk dengan target 153 dokumen, capaian 145 dokumen yaitu Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang 141 dokumen dan 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Jumlah pagu yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan hingga 31 Desember 2024 ini sejumlah Rp. 53.322.000,- tidak terdapat revisi dan finalisasi APBD-P. dengan realisasi sebesar Rp. 53.134.150,- atau 99.65 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 150 Dokumen capaian 141 Dokumen Laporan Hasil Pengujian untuk 7 komoditi (jagung, beras, rumput laut, biji cacao, kopi, VCO, lada putih). Ketidakaapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji cacao) sesuai keinginan pelanggan dan tidak maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pengambilan sampel (contoh uji) di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi
- Menjaga kompetensi analis

- b. Pengujian komoditi akreditasi dan non akreditasi serta pengujian produk pangan olahan.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi kualitas/mutu barang/produk agar sesuai standar nasional maupun internasional

c. Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang laboratorium

Tujuannya adalah:

- Menjamin agar pengujian dapat berlangsung dengan lancar dan baik.

d. Partisipasi Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium

Tujuannya adalah:

- Memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi laboratorium
- Menilai dan mengevaluasi kompetensi personil/analisis
- Memastikan keabsahan hasil pengujian

Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium yang diikuti meliputi:

- Uji Profisiensi Beras oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Paskapanen Pertanian, Kementerian Pertanian tanggal 12-16 Agustus 2024 dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).
 - Uji profisiensi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
 - Uji banding beras yang diselenggarakan oleh BPSMB Kalimantan Timur tanggal 24 Juni – 5 Juli 2024, dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).
 - Uji banding biji kakao yang dilaksanakan oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung tanggal 11-18 November 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
 - Uji banding lada putih yang dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 – 18 Oktober 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
- e. Penyediaan ATK seperti tinta printer, kertas dan bahan cetak/penggandaan

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 69.844.750,- kemudian pada tahapan finalisasi APBD-P terdapat revisi anggaran tambah kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (pembayaran pajak, bea dan perizinan ke belanja perjalanan dinas biasa) sehingga pagu setelah perubahan Rp. Rp. 69.844.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.719.210,- atau 99.82 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik, silva Rp. 125.540,-

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 3 sertifikat dan capaian sebanyak 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung serta belum ada sertifikat produk yang diterbitkan.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pengawasan mutu produk di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Menjamin keamanan keselamatan dan lingkungan dari produk
- Memastikan terwujudnya perlindungan konsumen

- b. Reakreditasi Laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Pelaksanaan setiap 5 tahun sekali.

Tujuannya adalah:

- Memastikan bahwa laboratorium pengujian memiliki kualitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan.
- Memberikan keyakinan kepada pelanggan/masyarakat bahwa layanan laboratorium memenuhi standar yang diterima, baik nasional dan internasional.

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi

Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat porsi anggaran dampak keterbatasan fiskal daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu. Dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Indicator kinerja kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan target 40 pelaku usaha, capaian 45 pelaku usaha.

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi dengan target 12 laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Pagu anggaran 2024 yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 39.436.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.435.048,- dengan silva Rp. 1.702,- Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%

Output kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan

oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, di larang dan/atau diatur
- c. Diatribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)

- e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistem elektronik

Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
 - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
 - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
 - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan

- Toko swalayan
- Gudang
- Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional
2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET

Tabel 3.5
Data pengawasan Perlindungan Konsumen
Di Provinsi Gorontalo. Tahun 2024

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	KETERANGAN
1	KASUS ALAT UKUR UTTP	20	liter/Timbangan
			(Pasar2 Tradisional)
			(diserahkan Di Kab/Kota)
2	SNI (Wajib)	41	Mainan anak
			Tusuk Kontak
			Kabel Listrik
			Kipas Angin
3	Harga Pada Barang	25	Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangan di Kab-Kota.
			Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir
4	Perbedaan Harga antara pajangan dab mesin hitung	10	Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir

NO	URAIAN (KATEGORI)	JUMLAH	KETERANGAN
5	Minyak Goreng Curah	5	Di jual tidak sesuai dengan Harga HET
6	KADALUARSA	10	Kab/Kota Di serahkan Ke B'POM
7	Makanan dan Minuman	6	Makanan dan minuman belum kadaluarsa tapi sudah berjamur
JUMLAH TEMUAN		117	

3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penyelenggaan Pasar Barang kebutuhan Pokok di daerah	<p>Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok di Daerah</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah</p> <p>SK Gubernur Gorontalo Nomor 403/16/X/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Subsidi kegiatan pasar murah bersubsidi pada penyelenggaraan pasar kebutuhan pokok di daerah.</p> <p>Instruksi Gubernur Gorontalo Nomor 800/DKUPP/451/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang pelaksanaan pasar barang kebutuhan masyarakat bersubsidi</p>	acuan dan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan operasi pasar, pasar murah non subsidi dan pasar murah bersubsidi
2	Pelaksanaan intervensi pasar terhadap komoditi beras dipasaran	<p>Hasil Rapat TPID tanggal 15 Maret 2024</p> <p>Instruksi Gubernur Gorontalo Nomor 800/DKUPP/instruksi/233/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Pelaksanaan intervensi pasar terhadap komoditi beras dipasaran</p>	Stabilisasi Harga, Pengendalian Inflasi dan memenuhi barang kebutuhan pokok masyarakat bulan Ramadhan 1445 H

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra OPD tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan
Dinas Kumperindag Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO	PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dok	1 Dok	50
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Lap	43 Lap	153,58
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7 Komoditi	8 komoditi	114,29
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7 Dok	7 dok	100

5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi DPRD untuk urusan ini yang ditindaklanjuti

Hal-Hal Lain Yang Dilaporkan :

- a. Pada urusan perdagangan yang tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiscal daerah sehingga target indicator kinerja tidak tercapai yaitu:
 - 1 program Pengembangan export

- 2 kegiatan yaitu kegiatan penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingkat daerah Provinsi; kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida Tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
 - 3 sub kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; sub kegiatan verifikasi mutu produk
- b. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 yang telah mencabut peraturan sebelumnya, maka segala kewenangan pengecer terdaftar, yang dokumen perizinannya sebelumnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, DICABUT, dan diberikan kesempatan kepada pengecer untuk dapat menyesuaikan dokumen perizinannya menjadi distributor atau kantor cabang distributor. (Kedua) Semua Kewenangan perizinan untuk menjadi distributor atau kantor cabang distributor bahan berbahaya, berada di Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi hanya terbatas dalam mengeluarkan dokumen rekomendasi gudang penyimpanan bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi serta penyimpanannya.
- c. Tahun 2024 BPSMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 3 komoditi, yaitu jagung, biji kakao dan kopi. Komoditi jagung untuk ekspor

ke Philipina sebanyak 32.900 ton jagung kering, serta komoditi biji kakao dan kopi untuk pasar domestik dan lokal.

- d. Pada bulan Juli 2024 telah dilaksanakan asesmen eksternal oleh Komite Akreditasi Nasional dalam rangka reakreditasi Laboratorium Pengujian LP-510-IDN, dan telah memperoleh sertifikat akreditasi KAN.
- e. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
- f. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
- g. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
- h. Tahun 2024 BPSMB telah melakukan finalisasi layanan pengujian berbasis teknologi informasi melalui sistem aplikasi SIMPELJITU, bekerjasama dengan Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo
- i. Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan perdagangan tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2024
Urusan Perdagangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	Dok	2	1	50
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dok	9	47	522,2
- Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	Dok	9	47	522,22
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	28	43	153,58
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	16	43	100
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	Laporan	12	12	100
- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	31	775

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Laporan	12	-	-
- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	<i>Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%</i>	Laporan	12	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi	7	8	114,29
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha	7	8	114,29
- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	<i>Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen	7	7	100
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kasus	11	297	2700
- Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	<i>Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif</i>	<i>BPSK</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Dokumen	153	145	94,78
- Verifikasi Mutu Produk	<i>Jumlah Komoditi Potensial Yang</i>	<i>Komoditi</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
	<i>Dipantau</i>				
- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Dokumen	150	141	94
- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi produk yang diterbitkan	Sertifikat	3	4	133,34
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Pelaku Usaha	40	45	112,50
- Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	12	12	100

6. Penghargaan nasional yang diterima OPD Provinsi Tahun 2024

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk urusan Perdagangan tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2024

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan OPD Provinsi Tahun 2024

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk urusan Perdagangan tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2024

8. Tugas Pembantuan/Penugasan dan Dana Dekonsentrasi

Pelaksanaan dekonsentrasi Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada urusan Perdagangan didukung oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Urusan Perdagangan terdiri atas 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu akhir sebesar Rp. 84.950.000,- dan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pagu akhir sebesar Rp. 233.190.000,-.

1). Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

1. Dasar Hukum

~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 - ~ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
 - ~ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
 - ~ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-090.03.3.319024/2024 tanggal 24 November 2024

2. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas

Alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

3. Program dan Kegiatan

Dalam Pelaksanaan dekonsentrasi Tahun 2024 program peningkatan perdagangan luar negeri Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 84.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.252.327,- atau 93,29%. Dan silva sebesar Rp. 5.697.673,-.

Tabel 3.8.
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Capaian Tahun 2024			
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir 2024	Realisasi Keuangan	%
I	Program Perdagangan Luar Negeri	84.950.000	84.950.000	79.252.327	93.29
	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	26.870.000	26.870.000	26.868.000	99,99
	Dukungan Manajemen & dukungan teknis lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	58.080.000	58.080.000	52.384.327	90.19

Program peningkatan perdagangan luar negeri ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Partisipasi pada rapat peningkatan ekspor dan koordinasi bidang perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan RI

Tujuan :

- a) Menyelaraskan program/kegiatan perdagangan luar negeri, Pengembangan ekspor dan hasil perundingan perdagangan internasional antara pusat dan daerah
- b) Menyusun program dan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri ke dalam alokasi anggaran dan dekonsentrasi

output:

- a) Laporan dari hasil rapat kerja kementerian perdagangan

- b) Laporan hasil dari penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi bidang perdagangan luar negeri adalah draf kertas kerja RKA-K/L dana dekonsentrasi bidang perdagangan luar negeri.
2. Dukungan Manajemen (ATK dan honor pengelola keuangan, perjalanan dinas koordinasi ke Kementerian Perdagangan RI)
- Tujuan :*
- Memberikan dukungan operasional satuan kerja dekonsentrasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelimpahan urusan di bidang perdagangan luar negeri kepada dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- Output :*
- Terlaksananya layanan operasional perkantoran Dana Dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kinerja satuan kinerja.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Dekonsentrasi Program Perdagangan Luar Negeri Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak adanya dukungan anggaran promosi pada kegiatan Promosi dan pengembangan Produk ekspor daerah yang merupakan target dalam renstra
- b. Kurangnya fasilitas ekspedisi/container sehingga cost yang dikeluarkan dalam melakukan pengiriman barang sangat tinggi.
- c. Tidak adanya dukungan anggaran pada kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku Usaha yang Memahami Prosedur Ekspor yang merupakan target dalam renstra

Solusi

Solusi/tindak lanjut yang perlu dilakukan :

- a. mengupayakan kerjasama baik dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual dalam hal membuka peluang ekspor. Harapan kedepan adalah dukungan anggaran

pada kegiatan promosi dan Pengembangan Produk ekspor daerah yang berdasarkan kebutuhan belanja untuk pencapaian target promosi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo

- b. Adanya koordinasi dengan instansi terkait serta pengusaha dibidang ekspedisi untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga masalah ini bisa teratasi.
- c. Kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku usaha perlu anggaran yang bisa membuka peluang pada UKM sebagai calon eksportir di Provinsi Gorontalo tapi kondisi ini disiasati dengan menghubungi para calon eksportir dan bersedia melaksanakan ekspor. Harapan kedepan adalah dukungan anggaran pada kegiatan promosi dan Pengembangan Produk ekspor daerah yang berdasarkan kebutuhan belanja untuk pencapaian target jumlah UKM yang memahami Prosedur ekspor.

2). Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

- ~ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
- ~ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319059/2024.
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319103/2024

2. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas

Alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

3. Program dan Kegiatan

Adapun fokus kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan realisasi kegiatan dan keuangan, Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah khususnya Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SATKER/PROGRAM	PAGU (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo			
319059	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			
	Dana Dekonsentasi	110.870.000,-	105.313.352,-	94,99
	Dana Tugas Pembantuan	122.320.000,-	122.313.700,-	99,99

Adapun rincian realisasi per kegiatan dari Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

KODE	URAIAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI VOLUME	SATUAN	PROGRESS%	
319059	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah								
	Dana Dekonsentrasi	110.870.000	105.313.352	94,99					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat	44.765.000	44.765.000	100	01.00	01.00	Daerah	100	
2	Dukungan Layanan Administrasi Satker	66.105.000	60.548.352	91,59	1	1	Layanan	100	
awal	Tugas Pembantuan	148.115.000							Anggaran Awal
1	Fasilitasi Pasar Murah	25.795.000	Blokir Automatic Adjustment (AA)						
2	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	-	-	-	-	-	-	
3	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	-	-	-	-	-	-	
	Tugas Pembantuan	122.320.000	122.313.700	99,99					Anggaran Perubahan
1	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	20.195.000	99.98	1	1	Daerah	100	
2	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	102.118.700	99.99	1	1	Daerah	100	

a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat bertujuan untuk :

- memastikan kepatuhan dinas yang membidangi perdagangan

kabupaten/kota dalam memantau dan melaporkan perkembangan harga Komoditi di Pasar Rakyat pada sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP) secara harian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemantauan

- memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pemantau harga di kabupaten/kota agar dapat melaksanakan pemantauan dan pelaporan sesuai petunjuk pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas data harga Komoditi di Pasar Rakyat pada sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP).

Adapun sasaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat tersebut yaitu tersedianya data harga harian barang kebutuhan pokok yang terkini, akurat dan berkelanjutan dari seluruh kabupaten/kota di tingkat Provinsi.

Lingkup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Komoditi di Pasar Rakyat meliputi:

- Monitoring pelaksanaan pemantauan dan pelaporan harga oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan;
- Supervisi langsung di pasar pantauan kabupaten/kota guna memastikan pemantauan telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan; dan
- Pelatihan dan pendampingan petugas pemantau harga Komoditi di Pasar Rakyat dari dinas kabupaten/kota.

Pada kegiatan ini pagu anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat yaitu Rp. 44.765.000,- , dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 44.765.000,- atau 100%

b) Dukungan Layanan Administrasi Satker

Layanan dukungan Satker dimaksudkan agar terlaksananya layanan berupa kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu)

tahun, seperti pengadaan ATK dan Komputer Suplies, Penggandaan Surat dan Dokumen, honorarium serta perjalanan dinas koordinasi/konsultasi.

Pada kegiatan ini terdapat ketentuan dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024, dimana untuk besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, hanya dapat diberikan/dibayarkan sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran Honorarium yang tersedia/tercantum dalam RKA-KL, sehingga untuk sisa 40% (empat puluh persen) harus dikembalikan ke negara, dan hal itu yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi seutuhnya.

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 66.105.000,- dengan realisasi senilai Rp. 60.548.352,- atau 91.59%.

c) Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, pada momen hari besar keagamaan adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah diharapkan dapat mendekatkan pelaku usaha kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipersingkat dan lebih efisien.

Pada kegiatan ini pagu anggaran kegiatan fasilitasi pasar murah yaitu Rp. 25.795.000,- tidak dapat direalisasikan karna mendapatkan blokir Automatic Adjustment (AA) oleh Kementerian Keuangan hingga akhir tahun.

d) Pelatihan Pelaporan Distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)

Kegiatan Pelatihan yang akan dilaksanakan saat ini merupakan amanat Pasal 25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting, hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha yang terdaftar.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha yang terdaftar diberikan pemahaman tentang cara pelaporan kegiatan distribusi Bapokting, dan harapannya kedepan kewajiban pelaporan ini akan rutin dilaksanakan oleh pelaku usaha setiap bulannya. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000,- dengan realisasi senilai Rp. 20.195.000,- atau 99.98%.

e) Perlindungan Konsumen di Daerah

Kegiatan Perlindungan Konsumen bertujuan agar konsumen sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 antara lain adalah Edukasi terkait Perlindungan Konsumen (Hari Konsumen Nasional), Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Tertib Niaga), dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, yang dimaksudkan dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri khususnya di provinsi Gorontalo, serta melindungi konsumen dan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk diantaranya memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan, dan yang terakhir

mewujudkan iklim usaha yang sehat.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 102.120.000,- dengan realisasi Rp. 102.118.700,- atau 99.99 %.

4. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan baik bersumber dari Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan, memiliki beberapa permasalahan antara lain :

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah memasuki semester 2(dua) tahun anggaran berjalan, bahkan ada yang baru bisa direalisasikan pada triwulan 4(empat), yang disebabkan regulasi terkait Petunjuk Teknis (Juknis) yang baru diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2024, ditambah dengan waktu pemrosesan kelengkapan administrasi keuangan yang berlarut-larut, sehingga berakibat pada molornya jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Adanya regulasi yang mengatur pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, hanya dapat diberikan/dibayarkan sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran Honorarium yang tersedia/tercantum dalam RKA-KL, sehingga untuk sisa 40% (empat puluh persen) harus dikembalikan ke negara, dan hal itu yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi seutuhnya.
- c. Keterbatasan anggaran APBN yang dialokasikan pada tahun 2024 yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, termasuk pada monitoring dan evaluasinya.

Tindak Lanjut

Mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun dan tentunya tetap berpatokan pada petunjuk teknis (JUKNIS) yang berlaku

Lampiran :

DAFTAR UMKM BERDAYA SAING TAHUN 2024

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT	NO HP
1	RISNA TAMRIN HASAN	BMS	KOTA GORONTALO	082190206706
2	LENI HARAS	DAHLIA	KOTA GORONTALO	085240174242
3	YUYUN KUGA	ALIYA PERMATA	KAB. BONE BOLANGO	0853 9937 3231
4	ZIKRAN MBUTI	MAFAHIM	KAB. GORONTALO	0852 1400 9566
5	GASIM BAIT	MOHOINGO	KAB. GORONTALO UTARA	085319998661
6	YUSRAN PAKAYA	OLAMI	KOTA GORONTALO	082291986838
7	DEWISUTO NASARU	RAHIDA COOKIES	KOTA GORONTALO	085342230313
8	PRAVITASARI NASARU	BACEMIL	KOTA GORONTALO	085317105496
9	REKAWATI LAWADJO	EKA CICILAN COOKIES	KOTA GORONTALO	0813 4210 0266
10	FENNY DAUD	FENISYA JAYA GROUP	KOTA GORONTALO	0811 4144 333
11	ZULKARNAIN BASYEREWAN	ZOELLEN	KOTA GORONTALO	0852 9999 3178
12	ERAWATI USMAN	BAKER'S AFA	KOTA GORONTALO	0821 9669 8147
13	EMMA HALIMATUZZUHRIYA	EMMA'S BAKERY	KOTA GORONTALO	0895 8050 71384
14	SELVI KADIR	PIA MUTIARA	KOTA GORONTALO	0811 4310 162
15	SULASMIYATI DJAUHARI	LI MAYA	KOTA GORONTALO	0852 5646 8312
16	YOWAN LASINDRANG	TILOMUNGO	KOTA GORONTALO	0813 5560 9278
17	UMMI KALSUM	YUMMI PLACE	KOTA GORONTALO	08114328899
18	HADJARIA LAMATO	HUMAYA	KAB. GORONTALO	082350332336
19	KARTIN ARSYAD	A'FIKRY	KOTA GORONTALO	082349703530
20	NOVITA DEU	NOVI CAKE'S	KOTA GORONTALO	085240045473
21	RISNAWATI SULEMAN	BROWN CAKE 69	KOTA GORONTALO	0852 4074 4007
22	SELVI ROMPIS	1000R CAKE	KOTA GORONTALO	0823 9877 7720
23	WINDARTI YALIDA	BRUDEL UMMU AZAM	KOTA GORONTALO	0853 4030 3718
24	SULASTRI SUMA	DAPUR MIKA	KAB. BONE BOLANGO	0822 9396 3498
25	FATMAWATY LASINDRANG	ANKIN	KOTA GORONTALO	0812 4249 2962

26	SRI AGUSTIN SUGITO	NUFARAB	KOTA GORONTALO	087844049116
27	WINDA VAN SOLANG	DNERS	KOTA GORONTALO	085240314015
28	MUTIARA MALIKI	MUTFOOD	KOTA GORONTALO	0821 9097 1134
29	PONISAH	MAMA ABSYAR	KAB. GORONTALO	0852 4013 3607
30	RACHMATIA M ARIDI	DEPULA LI TATA	KOTA GORONTALO	0812 4407 7550
31	RAHMATIA LAWADJO	LABUQU	KAB. BONE BOLANGO	0852 9924 6302
32	YUSRI DUNGGIO	UKM GULA AREN BONE BOLANGO	KAB. BONE BOLANGO	0853 4033 3050
33	YUNITA PULOO	RHAUMAH	KOTA GORONTALO	0821 9134 6516
34	ANNA SALEH	BOSAS CAKE	KOTA GORONTALO	082245459892
35	SRI NITA MOKODOMPIT	MHITA GO	KOTA GORONTALO	0823 9495 0133
36	RANO MASAUDO	PONKEP JAYA	KAB. GORONTALO UTARA	085745866023
37	IRAWATI FARID MALIK	ABON D LIRA	KAB. GORONTALO	081382269881
38	TESTIN PONGOLIU	ANDINI PASTEL	KAB. GORONTALO	081350246624
39	EVA RIVANA	ALBANA	KAB. BONE BOLANGO	081340400151
40	MOH. FADLI RAUF	MAYENA	KOTA GORONTALO	085256863855
41	HENI USMAN	NEGA GALLERY	KAB. BONE BOLANGO	085240364614
42	SRI NUNING DJAFAR	SAZAN	KAB. BONE BOLANGO	081343917764
43	SITTI HALIMA	GIDZA SASUKE	KOTA GORONTALO	0812 3141 2360

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA (APBD)
BAGI IKM INDUSTRI KIMIA SANDANG ANEKA DAN KERAJINAN
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua	Alamat	Jenis Usaha
1	Berkah Manidiri	Titen Hasan	Desa Topi Kec. Biau	Bunga Akrilik

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA (APBD)
BAGI IKM LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT ANGKUT
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

NO	NAMA IKM	NAMA IKM	ALAMAT	JENIS USAHA
1	Risal B. Djafar	Risal	Desa Dambalo Kec. Tomilito Kab. Gorut	Perbengkelan
2	Hafid Yusuf	Tosari Art	Desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorut	Perbengkelan
3	Ilham Mobilingo	Kastom Motor	Desa Limbato Kec. Tolinggula Kab. Gorut	Perbengkelan
4	Assasy Langulu	Bugor	Desa Jembatan Merah Kec. Tomilito Gorut	Perbengkelan
5	Oslan Nento	Maju Bersama	Desa Dudepo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato	Perbengkelan
6	Ersan Rifki	Las Saputra	Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato	Perbengkelan
7	Septian Dama	Las Tiga Putra	Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato	Perbengkelan
8	Mohamad Antula	Mega O	Kel. Dembe 1 Kec. Kota Barat Kota Gorontalo	Perbengkelan
9	Diah A. Magfirah	Anugerah 88	Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Perbengkelan
10	Riomin Pateda	IkM Rio	Kel. Buliide Kec. Kota Barat Kota Gorontalo	Perbengkelan
11	Nirwan Hasan	Service Point	Kel. Heledulaa U Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Perbengkelan
12	Ihwan R. Ismail	Bata Interlock	Desa Boludawa Kec. Suwawa Kota Bone Bolango	Perbengkelan
13	Moh. Rivaldy Lahay	Bengkel Palmas	Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo	Perbengkelan
14	Yakob Mopatu	Simpang Tiga Parungi	Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo	Perbengkela
15	Arifin Didipu	Rr Motor	Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru	Perbengkelan
16	Rais Umar	Rais Motor	Desa Tonala Kec Telaga Biru.	Perbengkelan
17	Fandy Pongoliu	Bipi Merah	Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo	Perbengkelan

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA (APBDP)
BAGI IKM KIMIA, SANDANG, ANEKA DAN KERAJINAN DAN IKM LOGAM MESIN
ELEKTRONIKA DAN ALAT ANGKUT DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama IKM	Ketua	Alamat	Jenis Usaha
1	IKM Rapika Taylor	Yulan Kusira	Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo	Penjahitan
2	IKM Berkah Taylor	Rabia Mahdjani	Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	Penjahitan
3	IKM Cahaya Rizky	Fitria Luntaya	Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	Penjahitan
4	IKM Ram Taylor	Ramli Pandji	Kelurahan Molosifat U Kec. Sibatana Kota Gorontalo	Penjahitan
5	IKM Rya Motor	Ridwan Kantau	Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	Perbengkelan

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMASAN (APBN)
BAGI IKM INDUSTRI KIMIA SANDANG ANEKA DAN KERAJINAN
TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua	Alamat	Jenis Usaha
1	<i>IKM Al Fazza</i>	Ramli Totoiya	Desa Leboto Kec. Kwandang Gorontalo Utara	Sulaman karawo
2	<i>IKM Karawo Li Inong</i>	Feronita Asuma	Jl. Adam Hoesa Dusun II Talumelito Telaga Biru kab. Gorontalo	Sulaman karawo
3	<i>IKM Tiar</i>	Isnawaty M. Ilahude	Jl. HB. Jassin Kota Selatan Kota Gorontalo	Fashion Karawo Ecoprint

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA (APBD)
BAGI KELOMPOK IKM PANGAN DAN FURNITURE
TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis IKM
1	Dapur Jago	Nur Cholisa	Desa Pentadio Timur Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo	Olahan Ikan
2	Minyak Kelapa Kampung Lupoyo	Muhsin Kadir	Desa Lupoyo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo	Minyak Kampung
3	Dodol Balahu	Suriyati Kalaha	Desa Balahu Kec.Tibawa Kabupaten Gorontalo	Dodol
4	Minyak Kampung Popayato	Alfian Lamadupa	Desa Dudewulo Kec.Popayato Barat Kabupaten Pohuwato	Minyak Kampung

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA (APBD)
BERUPA PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI
BAGI KELOMPOK IKM PANGAN DAN FURNITURE
TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis IKM
1	R2 Olamita	Djuniah Abdjul	Desa Harapan Kec.Wonosari Kab.Boalemo	Aneka Olahan Pangan
2	Meubel Mulya Indah	Mulyadin Sune	Desa Dulupi Kec.Dulupi Kabupaten Boalemo	Meubel
3	Teratai	Djuniah Abdjul	Jl.Ilahude Kec.Kota Timur Kota Gorontalo	Aneka Olahan Pangan

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN (APBDP)
FASILITASI BAHAN DAN PERALATAN FURNITURE
TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis IKM
KABUPATEN BONE BOLANGO				
1	Tulus Karya Mandiri	Syawal Setiawan Usman	Kel Pauwo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango	Pertukangan Kayu Meubel
2	Maju Bersama	Agus Dama	Kel Pauwo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango	Pertukangan Kayu Meubel
3	Ilopauwa	Syamsudin Ishak	Kel Pauwo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango	Pertukangan Kayu Meubel
4	Laulipa	Ibrahim Timo	Kel Pauwo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango	Pertukangan Kayu Meubel
5	Bagas Karya	Ratno Nupuri	Kel Pauwo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango	Pertukangan Kayu Meubel
KABUPATEN GORONTALO				
6	Meubel Amanah	Yukin Usman	Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	Meubel Kayu dan Perabot
7	Meubel Winda Star	Weni Usman	Desa Limehe Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	Meubel Kayu
8	Meubel Mulia	Hasan Huntu	Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Meubel Kayu

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN (APBDP)
FASILITASI BAHAN DAN PERALATAN IKM PANGAN
TAHUN 2024**

No	Nama IKM	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis IKM
1	Blauzar	Novianti Fathan	Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota. Gorontalo	Kue Basah Dan Kue Kering
2	Jee Cookies	Jihan Aluwani	Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota. Gorontalo	Kue Basah
3	Mo'olohu	Kasma Lakali	Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	Pia
4	O2 Jaya	Noldi N. Tane	Lingkungan III Kelurahan Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo	